BAB III

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Umum Pendidikan

Sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan

perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.

Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk

penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah.

Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat.

Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan

standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-ciri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.

Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.

Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa.

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya

yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Belanda digantikan oleh kekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan kebutuhan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat menjadi alat kekuasaan Jepang untuk kepentingan perang. Pendidikan pada masa kekuasaan Jepang memiliki landasan idiil hakko Iciu yang mengajak bangsa Indonesia berkerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama Asia raya. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.

Sejarah Belanda sampai Jepang dipahami sebagai alur penjelasan kalau pendidikan digunakan sebagai alat komoditas oleh penguasa. Pendidikan dibuat dan diajarkan untuk melatih orang-orang menjadi tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang menjadikan pendidikan sebagai senjata ampuh untuk menempatkan penduduk sebagai pendukung biaya untuk perang melalui berbagai sumber pendapatan pihak penjajah. Pendidikan pula yang akan dikembangkan untuk membangun negara Indonesia setelah merdeka.

Setelah kemerdekaan, perubahan bersifat sangat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan kepada kementrian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan supaya cepat untuk menyediakan dan mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan (Mestoko, 1985:145). Lalu, pemerintah mengadakan program pemberantasan buta huruf. Program buta huruf tidak mudah dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan sumber daya, kendala gedung sekolah dan guru. Kementrian PP dan K juga mengadakan usaha menambah guru melalui kursus selama dua tahun. Kursus bahasa jawa, bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu pasti(Mestoko dkk, 1985:161). Program tersebut menunjukkan jumlah orang yang buta huruf seluruh Indonesia sekitar 32,21 juta (kurang lebih 40%), buta huruf pada tahun 1971. Buta huruf yang dimaksud adalah buta huruf latin (Mestoko dkk, 1985:327). Jadi, kegiatan pemberantasan buta huruf di pedesaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menanggulangi angka buta aksara di Indonesia dan buta pengetahuan dasar, tetapi pendidikan kurang lebih tidak berdampak pada rumah tangga kurang mampu.

Pendidikan pada masa Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan sulit dicapai oleh orang-orang dari rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Setelah jaman kemerdekaan, rakyat dari rumah tangga kurang mampu terus menjadi sumber pemaksaan secara halus untuk pengembangan

bibit padi unggul. Pendidikan sebagai alat penguasa untuk mengembangkan program yang dianggap dapat mendukung peningkatan pemasukan pemerintah.

3.1.2. Sejarah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada tanggal 9 bulan Muharram tahun Alif atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April 1641 Masehi. Bupati pertamanya adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). dari bukti sejarah tersebut ditetapkan bahwa 20 April sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan bupati kemudian digantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan bupati kemudian dilanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) pada tahun 1681-1704.

Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pertemuan dengan para bupati se-Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704-1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707-1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763-1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang ke dalam pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) inilah ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi sungai Cikapundung atau alun-alun Kota Bandung sekarang. Pemindahan ibu kota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Raden Aria Adipati Wiranatakusumah IV (masa jabatan 1846-1874) dan pengikutnya (sekitar tahun 1870)

Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846-1874), ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar *master plan* Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. Kemudian dia memprakarsai pembangunan Sekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda berupa Bintang Jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.

Di masa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga, rel kereta api mulai dibangun, tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya rel kereta api ini ibu kota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa, dan Cina pun mulai menetap di ibu kota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat R.A.A. Martanegara, bupati inipun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi permukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893-1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, Kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

R. A. A. Wiranatakoesoema V (Dalem Haji, masa jabatan 1912-1931 dan 1935-1945) sebagai wakil *Volksraad* di Congres van Prijaji-Bond (Kongres Perhimpunan Priyayi) di Surakarta tahun 1929

Periode selanjutnya Bupati Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912-1931 sebagai bupati yang ke-12 dan berikutnya tahun 1935-1945 sebagai bupati yang ke-14. Pada periode tahun 1931-1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke-13. Selanjutnya bupati ke-15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945-1947) dan penggantinya adalah R.T.M. Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai bupati ke-17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956-1957).

Bupati berikutnya adalah Letkol. R. Memet Ardiwilaga (1960-1967). Kemudian pada masa transisi (Orde Lama ke Orde Baru) dilanjutkan oleh Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung, yaitu daerah Baleendah. Peletakan batu pertamanya pada tanggal 20 April 1974, yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke-333. Rencana pemindahan ibu kota tersebut berlanjut hingga jabatan bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980-1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis, daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai ibu kota kabupaten, maka ketika jabatan bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985-1990), ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Di tepi Jalan Raya Soreang, tepatnya di Desa Pamekaran inilah dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 hektare, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut memerlukan waktu sejak tahun 1990 hingga 1992.

Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna, S.I.P. terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat pemerintahan. Pada tahun 2003 semua aparat

daerah, kecuali Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di kompleks perkantoran Kabupaten Bandung. Pada periode pemerintahan H. Obar Sobarna, S.I.P. yang pertama telah dibangun Stadion Olahraga Si Jalak Harupat, yaitu stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi kota otonom.

Tanggal 5 Desember 2005, H. Obar Sobarna, S.I.P. menjabat bupati Bandung untuk kali kedua didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai wakil bupati, melalui proses pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Di masa pemerintahan H. Obar Sobarna yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis terbentuklah Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Ngamprah). Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat saat itu adalah Drs. Tjatja Kuswara.

3.1.3. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung :

"Terwujudnya pendidikan yang berprestasi, inovatif, professional, partisifatif dan agamis".

3.1.4. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung :

1. Mengupayakan perluasaan dan pemerataan pendidikan bermutu dan berkeadilan.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang inovatif melalui implementasi manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat.
3. Memberikan pelayanan yang profesional dan religius.
4. Mewujudkan transparansi, partisipatif, akuntabilitas.

3.1.4. Tujuan (*berdasarkan misi)*

1. Menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD), pengembangan pendidikan non formal, pengembangan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) serta memberikan kesempatan melaksanakan pendidikan hingga ke jenjang SMA/SMK dan sederajat.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pendidikan Berbasis Luas (BBE), Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill), serta jaringan dan pengembangan pendidikan berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekola (MBS) dan Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM).
3. Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang visioner dan kompeten, melaksanakan

pengembangan imtaq secara integral dalam setiap pelayanan pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

4. Meningkatkan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan serta peningkatan dan pengembangan lembaga pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

3.1.5. Strategi :

Tujuan dan sasaran ditempuh dengan berbagai strategi berikut :

Misi 1, strategi yang ditetapkan :

1. Penyediaan dan perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal
2. Peningkatan pelayanan pendidikan formal dan non formal
3. Penyediaan dana, sarana dan prasarana yang memadai berazaskan efektif, efisien dan berkeadilan

Misi 2, strategi yang ditetapkan :

1. Peningkatan pemahaman guru tentang penguasaan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi/kurikulum tingkat suatu pendidikan
2. Pengembangan sekolah standar nasional/internasional dan sekolah yang mandiri
3. Peningkatan pemberdayaan gugus sekolah, MGMP dan perluasan jaringan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pendidikan

Misi 3, strategi yang ditetapkan :

1. Mengutamakan kualitas pelayanan prima bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan

2. Mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya
3. Mengembangkan proses berfikir tenaga pendidikan dan kependidikan untuk menumbuhkan kreativitas
4. Menguatkan keyakinan beragama dan penguasaan iptek dalam melaksanakan tugas

Misi 4, strategi yang ditetapkan :

Mengembangkan pengelolaan pendidikan yang transfaran, pasrtisipatif, dan akuntabel.

3.1.6. Kebijakan

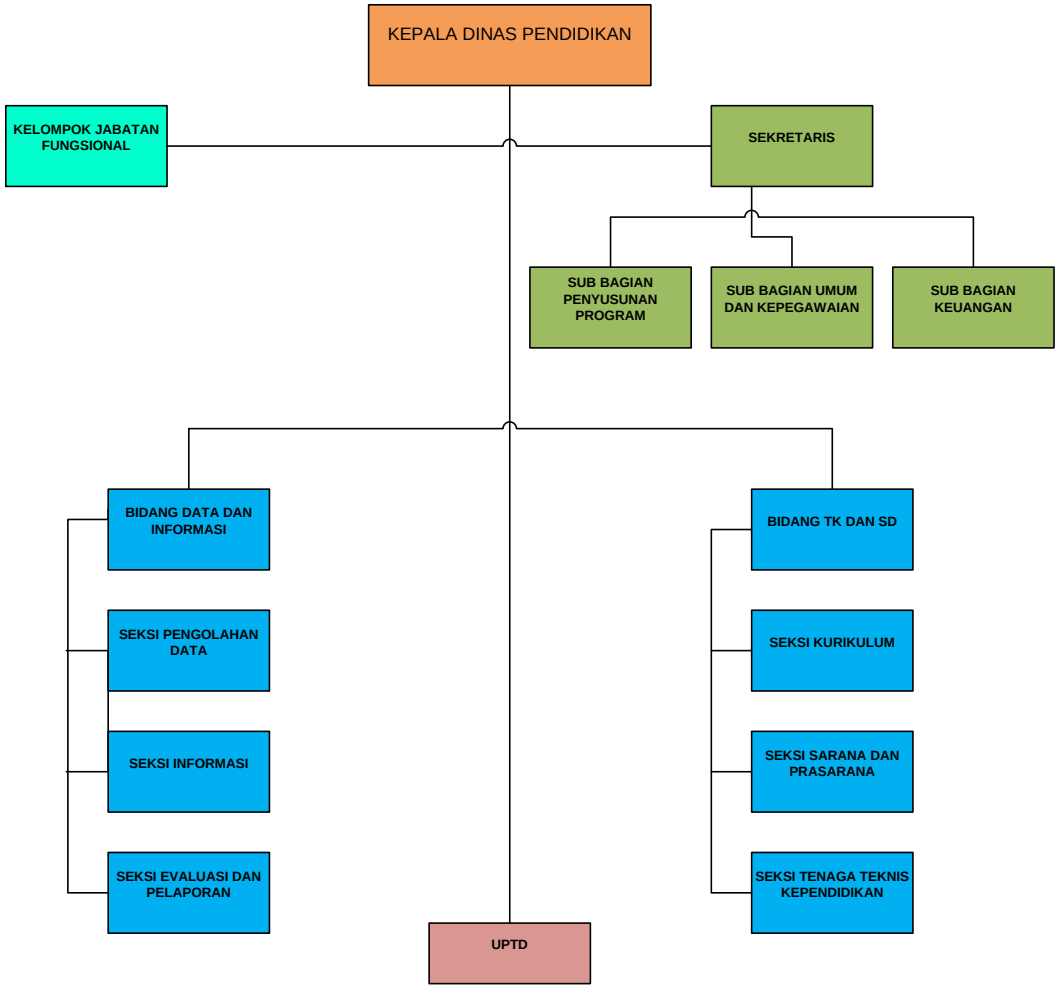
Kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksetabilitas melalui pendidikan formal dan non formal.
2. Peningkatan mutu pendidikan dengan pengembangan model manejemen pembelajaran serta demokratisasi dalam pendidikan.
3. Pelayanan prima dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang professional, memiliki keimanan dan ketaqwaan.
4. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel serta pembinaan Generasi Muda dan Olahraga.

3.1.7. Program

1. Peningkatan pelayanan pendidikan
2. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha terhadap Pendidikan
3. Pengkayaan Muatan Lokal, Kebudayaan Daerah dan Keagamaan
4. Pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun
5. Peningkatan dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Kejuruan
6. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
8. Pengembangan Manajemen Sekolah
9. Peningkatan Kesejahteraan Guru
10. Pengembangan Tingkat Partisipasi Sekolah
11. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
12. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
13. Pemberdayaan Potensi Generasi Muda Dalam Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Kepeloporan (*lintas SKPD*)
14. Pemeliharaan dan Pengembangan Budaya, Sejarah, dan Kepurbakalaan

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

3.3 Deskripsi Kerja

Deskripsi kerja adalah pernyataan-pernyataan tertulis yang meliputi tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja harus dilaksanakan dengan baik dan benar dalam satu organisasi.

Berikut ini deskripsi kerja atau tugas dan fungsi pokok :

1. **KEPALA DINAS**
    a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umun sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. Pembinaa dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan funsinya.

2. **SEKRETARIAT**
    a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
    b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
    c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrative Dinas;
    d. Penetapan rumusan kebijkan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
    e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas;
k. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
l. Paelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

3. BIDANG DATA dan INFORMASI

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan;
b. Penetapan rumusan kebijakan pemantauan dan evaluai bidang pendidikan;
c. Penetapan rumusan kebijakan pemutakhiran data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional;
d. Pengkoordinasian terhadap pelaksana fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah;
e. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan TK, SD, SMP, SMU, SMK dan pendidikan nonformal;
f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan TK, SD, SMP, SMU, SMK dan pendidikan nonformal;
g. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
h. Penetapan rumusan kebijakan rencana pengembangan teknologi informasi di tingkat satuan pendidikan;

i. Penetapan rumusan koordinasi pengumpulan dan pengolahan Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Pokok Sekolah dan Nomor Induk Tenaga Pendidik;
j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan;
k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan;
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
m. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan.

4. BIDANG TK dan SD

a. Penetapan punyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;
b. Penetapan rencana kebijakan dan oprasional pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD sesuai dengan perencanaan kebijakan nasional dan provinsi;
c. Penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

d. Penetapan kebijakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pada jenjang pendidikan TK dan SD berbasis keunggulan local;
e. Penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan TK dan SD;
f. Penetapan kebijakan koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang TK dan SD;
g. Penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;
h. Penetapan kebijakan sosialisasi dan implementasi standar isis dan standar kompetensi lulusan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;
i. Penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pada jenjang pendidikan TK dan SD;
j. Penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;
k. Penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;
l. Penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasana pada jenjang pendidikan TK dan SD;

m. Penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidikan dan tenaga kependidikan PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD;
n. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;
o. Pelaksanaan evaluasi tugas pada jenjang pendidikan TK dan SD;
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
q. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pendidikan jenjang pendidikan TK dan SD.

3.4 Analisis sistem pengajuan pindah siswa sekolah dasar (SD) yang sedang berjalan

Analisa sistem memberikan gambaran tentang sistem yang diamati yang saat ini berjalan. Kelebihan dan kekurangan sistem tersebut dapat diketahui dan diidentifikasi sehingga dalam membangun perangkat lunak lebih mudah. Dari analisa sistem lama maka akan ditemukan beberapa data dan fakta yang akan dijadikan bahan uji dan analisa menuju pengembangan dan penerapan sebuah aplikasi sistem yang diusulkan.